

KAJIAN LITERASI KEUANGAN PADA SISWA MENENGAH ATAS (SMA): SEBUAH PEMIKIRAN

Sahat Renol HS, Mintasih Indriayu
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sahatrenold96@gmail.com, mientasihindriayu@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi semakin kompleks sehingga menuntut manusia untuk terus dapat memenuhi kebutuhannya terlebih dengan adanya MEA. Masyarakat sekarang cenderung untuk melakukan pembelian tanpa memperhatikan prinsip keuangan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak rasional dalam membeli kebutuhannya, khususnya siswa. Keadaan saat ini menuntut masyarakat khususnya siswa memiliki kecerdasan serta skill untuk mengelola keuangan pribadinya. Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka siswa diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Pengelolaan keuangan lebih sering dikenal dengan literasi keuangan. Di Indonesia pemberian edukasi literasi keuangan sudah dilaksanakan oleh lembaga OJK yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam menghasilkan modul sebagai edukasi literasi keuangan bagi siswa khususnya siswa SMA. Pemberian topik-topik materi mengenai literasi keuangan belum disampaikan secara maksimal oleh guru sebagai pendidik dan fasilitator. Rendahnya indeks literasi keuangan Indonesia dibanding negara-negara lain terlebih rendahnya indeks literasi keuangan di tingkat siswa SMA menuntut kerja keras bagi dunia pendidikan di Indonesia terlebih siswa yang sudah dibekali pemahaman mengenai literasi keuangan akan dapat meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Perlu adanya pengembangan rancangan pembelajaran yang menganut dimensi pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap mengenai literasi keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan tujuan pembelajaran dan *outcome* demi peningkatan pemahaman siswa SMA untuk masa depannya.

Kata kunci: Literasi Keuangan, Siswa Sekolah Menengah Atas

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, permasalahan ekonomi semakin kompleks sehingga menuntut manusia untuk terus dapat memenuhi kebutuhannya. Ditambah dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berbagai jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh pasar semakin meningkat. Saat ini, masyarakat cenderung untuk melakukan pembelian tanpa memperhatikan prinsip keuangan. Prinsip keuangan yaitu membeli barang dan jasa yang dibutuhkan (*need*) bukan yang diinginkan (*want*). Era konsumsi saat ini semakin membuat konsumen tidak rasional dalam membeli kebutuhannya, termasuk anak dan remaja. Bahkan mereka merupakan segmen pasar yang sangat potensial karena sifatnya yang multidimensi, yaitu sebagai pasar primer karena mereka memiliki kebutuhan yang beragam, pasar pengaruh karena mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orangtuanya dan pasar masa depan karena mereka menjadi segmentasi pasar yang potensial dengan pertambahan usianya (Suprpti dalam Nokadianti, 2013: 55).

Setiap individu harus memiliki kecerdasan serta skill untuk mengelola keuangan pribadinya. Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka individu diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Dalam rangka memperoleh kesejahteraan keuangan, individu perlu memiliki pengetahuan, sikap, dan implementasi seseorang dalam mengelola keuangan, yang lebih dikenal dengan literasi keuangan. Negara-negara maju seperti seperti Amerika, Belanda, Swedia, Italia, Jepang, dan Selandia Baru (Lusardi, A & Mitchell, 2011: 9) juga gencar memberikan edukasi finansial kepada masyarakatnya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sadar pentingnya pendidikan literasi keuangan. Pemerintah dan otoritas publik memastikan bahwa seluruh penduduk memahami secara benar tentang literasi keuangan sehingga dapat berdampak positif bagi setiap individu atan dan peningkekonomi khususnya secara global. Bernheim, Garrett dan Maki (1997: 30) menyatakan bahwa pemberian pendidikan dan pengalaman keuangan yang diterapkan kepada siswa di Amerika

Serikat dalam jangka panjang dapat meningkatkan tabungan individu dan mengakumulasi kemakmuran ketika mereka dewasa.

Indonesia juga mulai memusatkan perhatian pada pentingnya literasi keuangan terlihat dari adanya Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yang pada pasal 2 menyatakan PUJK wajib melaksanakan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. OJK juga telah meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK). Pada dunia pendidikan, OJK telah bekerja sama dengan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyusun buku edukasi keuangan yang nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai literasi keuangan. Terkhusus bagi guru, OJK memberikan kegiatan edukasi Training of Trainers (ToT) bertujuan agar guru sebagai pendidik dan fasilitator dapat menyampaikan pengetahuan keuangan sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan siswa. Pemahaman literasi keuangan sebaiknya diberikan sedini mungkin sehingga ketika sudah dewasa, individu paham mengelola keuangan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Siswa yang sudah memahami literasi keuangan akan terbiasa dengan pengendalian diri yang berdampak pada pengurangan perilaku konsumtif.

Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah sebesar 21,84% (Dwiastanti 2015: 99). Itu berarti bahwa dari 100 orang Indonesia, hanya sekitar 21 orang yang memahami makna, fungsi dan pengelolaan keuangan. Menurut Master Card dalam *Indeks Financial Literacy* 2014 dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan tahun 2014, Indonesia berada di urutan ke 14 dari 16 negara.

Ranking	Overall Financial Literacy Index	Scores Components of Financial Literacy Index		
		Basic Money Management	Financial Planning	Investment
<i>Asia/Pacific</i>				
1	New Zealand	74	77	63
2	Singapore	72	73	58
3	Taiwan	71	68	63
4	Australia	71	75	63
5	Hong Kong	71	71	67
6	Malaysia	70	67	62
7	Thailand	68	63	61
8	Philippines	68	67	58
9	Myanmar	66	54	-
10	China	66	58	68
11	Bangladesh	63	56	60
12	Vietnam	63	57	52
13	Korea	62	58	48
14	Indonesia	60	56	47
15	India	59	50	57
16	Japan	57	58	39

Gambar 1.1 Indeks Financial Literacy

Indeks literasi keuangan berdasarkan tingkat pendidikan menurut hasil survei otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tingkat perguruan tinggi sudah cukup bagus sebesar 56,4%, tingkat sekolah lanjutan sebesar 35,7%, tingkat sekolah dasar sebesar 24,6% dan tidak sekolah sebesar 16,3%.

Tabel 1.1 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Indeks Literasi Keuangan
Perguruan Tinggi	56,4%
Sekolah Lanjutan	35,7%
Sekolah Dasar	24,6%
Tidak Sekolah	16,3%

Berdasarkan kelompok umur, indeks literasi keuangan menurut OJK juga masih rendah terlihat dari kelompok umur 18-25 tahun sebesar 35,5%, kelompok umur 26-35 sebesar 37,4%, kelompok umur 36-50 sebesar 36,0% dan kelompok umur >50 tahun sebesar 31,7%.

Tabel 1.2 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Indeks Literasi Keuangan
18-25 Tahun	35,5%
26-35 Tahun	37,4%
36-50 Tahun	36,0%
>50 Tahun	31,7%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih rendahnya tingkat literasi keuangan khususnya siswa. Rendahnya tingkat literasi keuangan siswa akan menyebabkan siswa kurang mampu mengontrol diri sehingga cenderung berperilaku konsumtif. Penelitian yang dilakukan oleh

Setiawati dalam Nokadianti (2013) menunjukkan bahwa perilaku konsumtif remaja pada umumnya 50% dari 100 siswa tergolong kategori yang kurang baik, ini dibuktikan dari remaja yang tidak membuat rencana pembelian sebelumnya sehingga mereka sering membeli barang dikarenakan ajakan teman serta suka sekalinya mereka pergi ke pusat perbelanjaan seperti Mall. Perilaku konsumtif yang dilakukan remaja pada saat ini merupakan suatu realita yang ada, yang bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga Negara lain. Agar keadaan seperti ini tidak semakin memburuk, sebaiknya remaja dibekali dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

Ini yang menjadi alasan pentingnya edukasi literasi keuangan dimulai di sekolah. Remaja yang sudah dibekali literasi keuangan akan mampu membedakan mana yang menjadi kebutuhan (*need*) dan mana yang hanya sekedar keinginan (*want*), dan mampu mengendalikan diri dalam melakukan perilaku konsumtif sehingga di masa depan mereka mampu mengelola keuangan mereka dengan bijak.

II. PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORI

1. Literasi Keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan pribadi mereka (Deng, Chi, Teng, Tang dan Chen, 2013: 68). OECD (2012) menjelaskan literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep keuangan dan risiko, dan keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan, untuk meningkatkan keuangan kesejahteraan individu dan masyarakat, dan untuk memungkinkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi. Ini didukung oleh Blue, Grootenboer, dan Brimble (2014: 52) bahwa literasi keuangan sebagai penerapan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai di konsumen dan konteks keuangan dan keputusan terkait yang berdampak pada diri, orang lain, masyarakat dan lingkungan.

Literasi keuangan dapat dimaknai sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut (Huston, 2010: 307). Kefela (2010: 211) berpendapat bahwa melek finansial sangat penting di berbagai tingkatan. Ini merupakan elemen penting dalam memungkinkan orang untuk mengelola urusan keuangan mereka dan dapat memberikan kontribusi penting untuk kesehatan dan efisiensi sistem keuangan, serta kinerja ekonomi.

Literasi keuangan sangat berhubungan dengan paparan ekonomi yang ada di sekolah (Lusardi dan Olivia, 2007: 206). Fabris dan Luburic (2016: 77) berpendapat literasi keuangan sebaiknya diberikan kepada siswa dikarenakan siswa sebagai agen pembangunan ekonomi masa depan. Ketika siswa tidak dibekali edukasi literasi keuangan, mereka akan menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan juga masyarakat. Ini akan berdampak negatif pada stabilitas keuangan khususnya keputusan keuangan yang salah sehingga akan meningkatkan pengeluaran anggaran dan sebagainya.

Child and Youth Finance International atau CYFI (2016) menjelaskan Edukasi literasi keuangan akan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Pengetahuan berarti memiliki pemahaman tentang masalah keuangan pribadi, Keterampilan berarti mampu menerapkan pengetahuan itu untuk mengelola keuangan pribadi, dan Keyakinan berarti merasa cukup percaya diri untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan pribadi seseorang.

Pemberian edukasi mengenai literasi keuangan akan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan siswa. Siswa yang sudah diberikan edukasi mengenai literasi keuangan akan membuat siswa lebih rasional dalam membuat keputusan keuangan (Fraczek dan Klimontowicz, 2015: 77). Pendapat lain juga mengatakan individu yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik akan lebih pintar dalam mengelola keuangannya untuk mencapai kemakmuran (Dwiastanti, 2015: 104). Ini berarti edukasi literasi keuangan memberikan pengajaran yang baik kepada siswa.

Pemberian edukasi tentang literasi keuangan juga dapat memberikan pemahaman yang dapat digunakan untuk memahami produk-produk pasar keuangan, terutama imbalan dan risiko, dalam rangka untuk membuat pilihan informasi. pendidikan keuangan dasar harus dibuat relevan dan berguna untuk kehidupan sehari-hari dan kegiatan pembangunan (Kefela, 2010: 211).

B. IMPLEMENTASI *FINANCIAL LITERACY* PADA SISWA MENENGAH ATAS

Seefeldt dalam Rapih (2016:21) menjelaskan bahwa salah satu kemampuan yang harus diajarkan kepada siswa yaitu dapat membedakan mana kebutuhan dan hanya sekedar keinginan. Edukasi literasi keuangan diperoleh salah satunya melalui pendidikan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari strategi nasional yang terkoordinasi. Program sekolah harus memungkinkan setiap anak di negara atau wilayah mendapat pemahaman literasi keuangan melalui sekolah sehingga mereka dapat lebih memahami dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Seorang siswa perlu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat keputusan penting untuk mengelola keuangan pribadinya (Chen dan Volpe (1998: 108). Nababan dan Sadalia dalam Dwiastanti (2015: 99) menyatakan “*The best way to improve behavior in adulthood is a way to good behavior since childhood, including financial behavior. Financial behavior related to how people treat, manage, and use the available financial resources*”.

Pemerintah baik departemen pendidikan harus menjamin relevansi dan jangka panjang dari kesinambungan program. Pengenalan edukasi literasi keuangan di sekolah harus melibatkan pendekatan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan keadaan nasional, regional, atau lokal. OECD (2012) menjelaskan bahwa pada tahun 2005 OECD merekomendasikan pendidikan keuangan mulai sedini mungkin diajarkan di sekolah-sekolah, dan pada tahun 2012, literasi keuangan merupakan komponen opsional dari OECD *Program for International Student Assessment (PISA)*. (OECD, 2013) menjelaskan isi dari kerangka pembelajaran dapat bervariasi sesuai dengan keadaan nasional, regional atau lokal, identifikasi bakat tertentu, kebutuhan, aspirasi dan kesenjangan, struktur dan persyaratan sistem pendidikan, dan pertimbangan budaya atau agama, serta pendekatan yang dianut untuk pengenalan edukasi literasi keuangan di sekolah. Kerangka belajar umumnya memberikan daftar topik, tema atau isu-isu yang dapat dimasukkan dalam edukasi literasi keuangan. Topik yang paling sering termasuk dalam kerangka pembelajaran literasi keuangan adalah:

1. Uang dan transaksi.
2. Perencanaan pengelolaan keuangan (termasuk tabungan dan pengeluaran; kredit dan utang; pengambilan keputusan keuangan).
3. Resiko dan imbalan.
4. Lanskap keuangan (termasuk hak-hak konsumen dan tanggung jawab dan pemahaman tentang sistem keuangan, ekonomi dan sosial yang lebih luas).

Kerangka belajar dari literasi keuangan idealnya mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku, serta sikap dan nilai-nilai juga dapat mencakup keterampilan kewirausahaan. Banyak negara yang sudah menerapkan edukasi literasi keuangan memasukkan dimensi tersebut.

Tabel 1.3 Dimensi dalam kerangka pembelajaran literasi keuangan

	Knowledge and understanding	Skills and competencies/capability	Attitudes and values	Enterprise
Australia	√	√	√	√
Brazil	√	√	√	
England	√	√	√	
Japan	√	√	√	√
Malaysia	√	√	√	
Netherlands	√	√	√	√
New Zealand	√	√	√	
Northern Ireland	√	√	√	
Scotland	√	√	√	√
South Africa	√	√	√	√
United States – Jump\$art	√	√	√	

Dimensi dalam kerangka berpikir ini selanjutnya dimasukkan dalam rancangan pembelajaran yang harus dimiliki siswa usia 16-18 tahun oleh setiap negara tersebut yang menjabarkan tujuan pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 1.4. Kompetensi Dasar untuk usia 16-18 Tahun

Dimensi	Tujuan Pembelajaran
Pengetahuan dan Pemahaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa tahu perbedaan antara uang transfer dan uang tunai dan tahu menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa tahu tentang jenis-jenis uang: uang tunai, dompet elektronik, kartu debit dan kartu kredit b. Siswa bisa menimbang antara keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pembayaran c. Siswa memahami konsep 'kredit' dan 'rugi'

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Siswa tahu darimana uang berasal: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa paham mendapatkan uang dengan bekerja. b. Siswa tahu dengan cara meminjam uang 3. Siswa tahu di mana uang pergi ke: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa memahami 'biaya rumah tangga' b. Siswa memahami uang dalam bentuk kontribusi pajak dan asuransi nasional dikurangkan dari 'gaji' c. Siswa tahu perbedaan antara laba yang dilaporkan penghasilan tidak dilaporkan d. Siswa mampu menjadi konsumen yang sadar dan kritis, dan menimbang harga dan kualitas e. Siswa memahami produk-produk keuangan untuk jangka panjang, seperti hipotek, pensiun dan asuransi, dan dapat membedakan sedikitnya dua jenis hipotek 4. Siswa dapat membedakan risiko keuangan dan pengembalian uang: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa memahami cara menyimpan dan meminjam uang b. Siswa memahami cara menyimpan uang di rekening giro atau tabungan c. Siswa memahami pentingnya menjaga 'buku rumah tangga' d. Siswa memahami perbedaan antara utang 'baik' (direncanakan dan dikelola) dan utang yang tidak diinginkan (tidak direncanakan dan tidak terkendali) e. Siswa memahami ada risiko ketika tidak membayar tagihan f. Siswa tahu dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan utang jika berada dalam kesulitan keuangan
Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan pengalaman dunia siswa: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa memiliki wawasan pola pengeluaran, berkaitan dengan hiburan, penggunaan telepon seluler dan uang yang dihabiskan untuk pakaian. b. Siswa mampu mengambil asuransi c. Siswa dapat membuat keputusan pada pekerjaan paruh waktu d. Siswa dapat memperoleh informasi secara independen tentang hak-hak mereka sebagai karyawan (kesehatan dan keselamatan kerja, upah minimum) 2. Kualifikasi peran 3. Siswa berperan dalam bertindak secara giat dan bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa menyadari peluang keuangan di pasar dan para pemain di pasar 4. Siswa berperan dalam mengatur kepuasan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, aset dan utang 5. Siswa berperan dalam menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan agar seimbang dan tidak ada defisit. 6. Siswa berperan dalam menyimpan catatan keuangan dengan aktif: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa mampu menyimpan catatan pribadi secara rapi, sehingga informasi dapat dengan mudah diambil b. Siswa mematuhi kewajiban pembayaran 7. Siswa berperan dalam memastikan siswa memiliki pendapatan atau aktiva yang memadai: <ol style="list-style-type: none"> a. Mereka dapat memperoleh pendapatan yang memadai 8. Siswa berperan tidak menimbulkan utang: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa mampu menghindari munculnya utang pribadi dengan intervensi dalam hal tunggakan pembayaran 9. Siswa berperan dalam menyesuaikan keuangan mereka dalam hal perubahan keadaan pribadi atau kehidupan siswa atau pengembangan tahap mereka <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa memiliki ide umum mengenai kehidupan siswa dan tahu bahwa siswa harus menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran mereka jika terjadi perubahan keadaan.

Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan dengan pengalaman dunia siswa: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa menyadari finansial berhubungan dengan masa mendatang b. Siswa menyadari perubahan yang akan terjadi sebagai mahasiswa di kemudian hari (sewa kos, bantuan, pekerjaan paruh waktu, biaya studi, asuransi, pinjaman mahasiswa) c. Siswa menyadari konsekuensi keuangan dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan perawatan, hubungan, perceraian dan pensiun d. Siswa menyadari tekanan dan tujuannya e. Siswa menyadari tekanan sosial terhadap pengeluaran kelompok sebaya pada barang-barang pokok. 2. Kualifikasi peran 3. Siswa berperan sebagai konsumen yang sadar: <ol style="list-style-type: none"> a. Mereka mengembangkan kebiasaan pembelian pribadi dengan preferensi pribadi dan dengan anggaran pribadi yang tersedia 4. Siswa berperan dalam mengatur urusan keuangan dengan cara yang sadar: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa mampu untuk masuk ke dalam skema tabungan dan bentuk kredit yang sesuai dengan anggaran dan keinginan pribadi. b. Siswa mampu mengambil asuransi pribadi yang memadai 5. Siswa berperan secara lugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa menyadari masalah keuangan yang mempengaruhi organisasi b. Siswa memiliki pemahaman tentang konsep-konsep keuangan, dan menyadari konsekuensi keuangan untuk melaksanakan pekerjaan sendiri c. Siswa dapat berbicara dalam hal biaya dan manfaat d. Siswa memanfaatkan informasi keuangan untuk mengikuti perkembangan kinerja organisasi 6. Siswa berperan secara sadar mengenai biaya, baik secara pribadi dan profesional: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa memilih untuk memotong biaya dan menerapkannya sedapat mungkin b. Siswa menggunakan berbagai sumber daya paling ekonomis c. Siswa menggunakan metode penghematan biaya paling efektif d. Siswa menimbang antara biaya dan manfaat e. Tujuan siswa adalah untuk menghemat tanpa membatasi layanan f. Siswa menjaga pengeluaran yang tidak perlu dan mengambil tindakan yang diperlukan
-------	--

Dimensi inilah yang menjadi dasar dari beberapa negara mengembangkan tujuan pembelajaran dari literasi keuangan sesuai kebutuhan. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di beberapa negara tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Rancangan Pembelajaran Literasi keuangan

Country	Framework	Date Published	Responsible Institutions
Australia	National Consumer and Financial Literacy Framework	First published 2005 Updated 2009, 2011	Ministerial Council for Education, Early Childhood and Development and Youth Affairs (MCEECDYA)
Brazil	Guidance for Financial Education in Schools	2009	Department of Education at national and local levels; coordinated by the Brazilian Security Exchange Commission (CVM) with the support of the Central Bank, the Private Pension Plans Secretary (PREVUC) and the Insurance Supervisory and Regulatory Authority (SUSEP)
England	Guidance on Financial Capability in the Secondary Curriculum: Key Stage 3 and 4	2008	Department for Children, Schools and Families
Japan	Financial Education Program in Schools	2007	Central Council for Financial Services Information
Netherlands	Basic Vision on financial education: curriculum framework for development and implementation	January 2009	CentiQ headed by the Dutch Ministry of Finance
Malaysia	Framework on Financial Education for Malaysian school children under the School Adoption Programme	2006	Bank Negara Malaysia, in collaboration with the Ministry of Education and the financial institutions that participate in the Schools Adoption programme
New Zealand	Financial Capability in the Curriculum	2009	The Ministry of Education with input from the Commission for Financial Literacy and Retirement Income
Northern Ireland	Northern Ireland Curriculum Financial Capability	2007	Northern Ireland Executive, Council for the Curriculum, Examinations and Assessment
Scotland	Financial Education in Scottish Schools; A Statement of Position	1999	Scottish Council of Consultative Council on the Curriculum
South Africa	Integrated in the SA National Curriculum Statement	2004	Department of Education and Financial Services Board
USA-JumpStart	National Standards in K-12 Personal Financial Education	3 rd Edition, 2007	JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy

Di Inggris, Skotlandia, Selandia Baru dan Irlandia Utara kerangka edukasi literasi keuangan dikembangkan oleh lembaga pendidikan pemerintah dengan tanggung jawab untuk kurikulum di sekolah. Di Australia, kerangka dikembangkan oleh Dewan Menteri Pemerintah Australia tentang Pendidikan, Pelatihan dan Urusan Pemuda (MCEETYA) yang terdiri dari wakil-wakil dari semua wilayah hukum negara dan teritorial dan tradisional menetapkan agenda kebijakan nasional. Di Afrika Selatan, kerangka pembelajaran dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Dewan Jasa Keuangan.

Di Malaysia, Jepang dan Belanda ada masukan sektor swasta yang signifikan dalam pengembangan kerangka edukasi pembelajaran literasi keuangan. Bank Negara Malaysia bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan lembaga keuangan lainnya untuk mengambil peran kepemimpinan dalam kerangka pemahaman literasi keuangan. Di Jepang, Dewan Pusat Informasi Jasa Keuangan, terdiri dari Bank of Japan dan organisasi anggota lainnya, mengambil peran utama dalam pengembangan program pendidikan keuangan. Di Belanda, kesepakatan (Centiq) disimpulkan oleh pemerintah dan mitra dari sektor keuangan dan organisasi konsumen.

Kerangka dari Amerika Serikat dikembangkan oleh Jump Koalisi Start untuk Personal Financial Literacy, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari 180 sektor swasta dan organisasi pendidikan dan 47 koalisi negara berafiliasi. Tidak menutupi wajib sistem sekolah nasional.

Di Brazil, Selandia Baru, Afrika Selatan dan lembaga yang didanai pemerintah Inggris Raya dengan tanggung jawab untuk kepemimpinan nasional strategi keuangan mengambil peran utama dalam memulai dan mengembangkan kerangka edukasi literasi keuangan. Di Selandia Baru, Komisi Financial Literacy dan Pendapatan Pensiun dikembangkan, diuji coba dan mandiri mengevaluasi rancangan kerangka kemudian secara resmi menyerahkan tanggung jawab kepada Departemen Pendidikan. Di Afrika Selatan, Financial Services Board memainkan peran penting dalam mengembangkan komponen pendidikan keuangan untuk diintegrasikan dalam Pernyataan Kurikulum Nasional (NCS).

Di Indonesia sendiri lembaga yang mengambil peran dalam pemberian edukasi literasi keuangan adalah OJK yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam menghasilkan modul sebagai edukasi literasi keuangan bagi siswa khususnya siswa SMA. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, implementasi dari edukasi literasi keuangan di Indonesia belum terlihat secara maksimal. Pemberian topik-topik materi mengenai literasi keuangan belum disampaikan secara maksimal oleh guru sebagai pendidik dan fasilitator. Rendahnya indeks literasi

keuangan Indonesia dibanding negara-negara lain terlebih rendahnya indeks literasi keuangan di tingkat siswa SMA menuntut kerja keras bagi dunia pendidikan di Indonesia terlebih siswa yang sudah dibekali pemahaman mengenai literasi keuangan akan dapat meingkatkan ekonomi negara Indonesia. Perlu adanya pengembangan rancangan pembelajaran yang menganut dimensi pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap mengenai literasi keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan tujuan pembelajaran dan *outcome* demi peningkatan pemahaman siswa SMA untuk masa depannya. Guru sebagai pendidik dan fasilitator juga perlu diberikan pelatihan dan pengembangan profesional mengenai edukasi literasi keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baron-Donovan, Wiener, Gross, dan Block-Lieb (2005) menunjukkan bahwa pelatihan guru yang dirancang dengan baik akan mempengaruhi keyakinan dan siap untuk mengajar.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa:

1. Literasi keuangan merupakan salah satu komponen sumberdaya manusia, komponen ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Tingkat literasi keuangan Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain.
2. Pendidikan keuangan mulai sedini mungkin diajarkan di sekolah-sekolah, dan isi dari kerangka pembelajaran dapat bervariasi sesuai dengan keadaan nasional, regional atau lokal, identifikasi bakat tertentu, kebutuhan, aspirasi dan kesenjangan, struktur dan persyaratan sistem pendidikan, dan pertimbangan budaya atau agama, serta pendekatan yang dianut untuk pengenalan edukasi literasi keuangan di sekolah.
3. Kerangka belajar dari literasi keuangan idealnya mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku, serta sikap dan nilai-nilai.
4. Di Indonesia sudah adanya pemberian edukasi literasi keuangan dikalangan siswa SMA, namun belum dilaksanakan secara optimal.
5. Perlunya pelatihan bagi guru sebagai pendidik dan fasilitator mengenai literasi keuangan.
6. Perlu adanya pengembangan rancangan pembelajaran yang terintegrasi Strategi Nasional dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia namun tidak menghilangkan ketiga dimensi yakni pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, serta sikap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Kuasa atas nikmatnya hingga sekarang ini. Tanpa kasih dan anugerah-Nya, tulisan ini dapat terselsaikan. Terimakasih atas support kepada orangtua, keluarga, dan rekan-rekan, serta dosen-dosen Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

REFERENSI

- Baron-Donovan, C., Wiener, R. L., Gross., K., & Block-Lieb, S. 2005. *Financial literacy teacher training: A multiple-measure evaluation*. Financial Counseling and Planning, 16(2), 63–75.
- Blue,L., Grootenboer, P., & Brimble, M. 2014. *Financial Literacy Education in the Curriculum: Making the Grade or Missing the Mark?*. International Review of Economics Education, 16, pp. 51-62.
- Bernheim, B. D., Garrett, D. M., & Maki, D. M. 1997. *Education and Saving: The Long-Term Effects of High School Financial Curriculum Mandates*. National Bureau of Economic Research. Working Paper 6085.
- Chen, H., & Volpe R. P. 1998. *An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students*. Financial Services Review, 7(2), 107-128.
- Child and Youth Finance International. 2016. *Training Course on: Fostering National Financial Education Strategies*. Podgorica: CYFI and GIZ.
- Deng, H., Chi, L., Teng, N., Tang., & Chen, C. 2013. *Influence of Financial Literacy of Teachers on Financial Education Teaching in Elementary School*. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 3(1), pp. 68-73.
- Dwiastanti, A. 2015. *Financial Literacy as the Foundation for Individual Financial Behavior*. Journal of Education and Practise, 6(33).
- Fabris, N., & Luburic, R. 2016. Financial Education of Children and Youth. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2(1), pp. 65-79.

- Huston, S. J. (2010). *Measuring financial literacy*. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), pp. 296-316.
- Kefela, G. T. 2010. *Promoting Access to Finance by Empowering Consumers: Financial Literacy in Developing Countries*. Educational Research and Reviews, 5(5), pp. 205-212.
- Lusardi A., & Olivia S. M. 2007. *Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth*. Journal of Monetary Economics, 54(1), pp. 205-24.
- Lusardi, A & Mitchell O. S. 2011. *Financial Literacy Around The World: An Overview*. NBER Working Paper Series. National Bureau of Economic Research.
- Nokadianti, S. M. 2013. *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orangtua, Lingkungan, dan Pengetahuan Dasar Ekonomi Terhadap Rasionalitas Perilaku Konsumsi*. Jurnal Pendidikan Humaniora, 1(1)
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2012. PISA 2012 Frameworks - Mathematics, Problem Solving and Financial Literacy. Paris: OECD.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2012. Financial Education For Youth And In Schools: OECD/ Infe Policy Guidance, Challenges And Case Studies.